



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAHAN (LKJIP)  
TAHUN 2023**



**KECAMATAN MANDING KABUPATEN  
SUMENEP**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Manding Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah tahun anggaran berakhir.

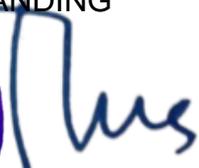
Penyusunan laporan ini merupakan upaya Kecamatan Manding sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 dan wujud konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Yaitu pertama, LKjIP merupakan sarana bagi Kecamatan Manding untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemberi pedelegasian wewenang. Kedua, LKjIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Manding untuk perbaikan kinerja di masa datang.

Guna memenuhi kedua fungsi utama tersebut, laporan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja untuk tahun 2023 sesuai sasaran kinerja yang ingin dicapai dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumenep dan RENSTRA Kecamatan Manding. Dalam hal ini, informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Kecamatan Manding dalam upaya pemenuhan Visi dan Misi.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh staf Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

Manding, 05 Februari 2024

   
KECAMATAN MANDING  
**NASAH BANDY, SE., Kp, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700907 199703 1 006

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara umum Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang baik dan proporsional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai Kerja yang harmonis diantara Perangkat Daerah, Pemerintah dan Masyarakat di daerah Kecamatan Manding.

Dari 6 sasaran program yang ditetapkan dan tercakup dalam 12 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang direncanakan, capaian indikator kinerja rata-rata 99% atau termasuk kategori sangat berhasil. Sedangkan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal di Kecamatan Manding Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.3.122.842.668,00** dengan rincian yaitu Belanja Operasi sebesar **Rp.3.078.650.411,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 44.192.257,00**

Penggunaan dana untuk Belanja Operasi dengan rencana anggaran sebesar **Rp. 3.078.650.411,00** terealisasi sebesar **Rp. 2.776.373.411,00** sehingga sisa dana **Rp.302.277.000,00** atau terserap **90,18 %**. Sedangkan alokasi dana untuk Belanja Modal sebesar **Rp. 44.192.257,00** terealisasi sebesar **Rp. 44.100.000,00** sehingga sisa **Rp. 92.257,00** atau terserap **99,79 %**.

Dalam pencapaian tujuan, sasaran dan program Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep menunjukkan hasil yang baik, namun disisi lain dalam implementasinya masih dijumpai beberapa hambatan dan permasalahan baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Adapun hambatan dan permasalahan dimaksud yaitu :

a. Permasalahan Internal

- 1) Masih rendahnya kerjasama antar seksi dalam rangka mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan sebagai suatu lembaga yang berada satu atap;
- 2) Jumlah pegawai yang sedikit tidak seimbang dengan beban tugas, sehingga kurang mendukung keberhasilan suatu organisasi, akibat rendahnya kompetensi dan motivasi pegawai untuk maju.

b. Permasalahan Eksternal

- 1) Masih rendahnya kesadaran sebagian PD terhadap pentingnya data, karena pembangunan itu akan berhasil dengan baik apabila didukung dengan data yang akurat dan tepat waktu;

- 2) Adanya kontrol masyarakat yang sangat intensif, dengan adanya kebebasan untuk menyampaikan pendapat masyarakat memperoleh kesempatan dalam menyumbangkan pendapat dan pikirannya untuk menilai suatu perencanaan dimaksud benar-benar realistis dan transparan.

Sebagai langkah antisipasi terhadap beberapa hambatan untuk mewujudkan pencapaian kinerja Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep diperlukan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan PD terkait untuk mengevaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
2. Melaksanakan musyawarah desa untuk penjarangan aspirasi masyarakat sebagai informasi bagi kita.

Agar selalu dapat mempertahankan kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Manding dalam bentuk memberikan masukan kepada Kantor Kecamatan Manding tentang sejauh mana tingkat kepuasan yang diterima atas pelayanan baik dibidang teknis operasional maupun dibidang administrasi yang sudah diberikan oleh organisasi, serta dapat memberikan masukan tingkat pelayanan seperti apa yang diharapkan dari Kantor Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

Manding, 05 Februari 2024

CAMAT MANDING



NASIH BANDY, SE., Kp, M.Si

Camat, Tingkat I

NIP. 19700907 199703 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	2
A. VISI DAN MISI KABUPATEN YANG BERKENAAN DENGAN TUSI OPD...	2
B. TUJUAN, SASARAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET RENSTRA ...	2
C. TUJUAN, SASARAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2021	3
D. PERJANJIAN KINERJA .....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	13
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	15
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA .....	17
D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN .....	20
E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	20
F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA .....	27
G. REALISASI ANGGARAN .....	31
BAB IV PENUTUP .....	37

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka bersama ini kami Laporkan Kinerja Perangkat Daerah atas Perjanjian Kinerja yang telah disepakati sebelumnya.

Pelaporan Kinerja selain berpedoman kepada selain berpedoman kepada ketentuan PermenpanRB tersebut di atas, juga telah diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada publik atas penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, juga berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah direncanakan dan diperjanjikan, serta sebagai bahan pertimbangan memutuskan kebijakan dalam rangka upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya LKjIP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan penyusunan LKjIP selain sebagai salah satu alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja daerah juga untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep. Keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber untuk bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. VISI DAN MISI KABUPATEN YANG BERKENAAN DENGAN TUSI PD**

Visi dan Misi Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep berdasar pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, yaitu:

##### **1) VISI**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang merefleksikan cita-cita Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep yang hendak dicapai dimasa yang akan datang dan juga penentu arah perjalanan organisasi. Karena Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, maka secara logis visi Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran operasionalisasi dari dan mendukung visi Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan merumuskan visi sebagai berikut : ***“SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”***.

##### **2) MISI**

Untuk mewujudkan visi pembangunan seperti dimaksud di atas telah dirumuskan misi pembangunan yang dilaksanakan kedepannya agar tujuan pembangunan dapat tercapai, adapun misi Kecamatan Manding termasuk dalam Misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai RPJMD Tahun 2021- 2026 yaitu : ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat”***

#### **B. TUJUAN, SASARAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET RENSTRA**

Adapun tujuan, sasaran, indikator dan target RENSTRA Perangkat Daerah Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 yaitu:

##### **1. TUJUAN**

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep yaitu

###### **a. Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan**

Indikator tujuan tersebut yakni Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan.

###### **b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator tujuan tersebut yakni nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan

## 2. SASARAN

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, maka sasaran perangkat daerah Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, yakni :

- a. Meningkatnya Mutu Layanan Publik, dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan
- b. Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Adapun Tujuan, Sasaran beserta Indikator dan Target Renstra Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran beserta Indikator dan Target Renstra  
Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026

TUJUAN/ SASARAN	IDIKATOR KINERJA	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan</b>	<b>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan</b>	<b>80 skor</b>	<b>81 skor</b>	<b>82 skor</b>	<b>82 skor</b>	<b>82 skor</b>
Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	<b>80 skor</b>	<b>81 skor</b>	<b>82 skor</b>	<b>82 skor</b>	<b>82 skor</b>
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>SAKIP PERANGKAT DAERAH</b>	BB skor				
Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

### C. TUJUAN, SASARAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2023

Adapun tujuan, sasaran, beserta indikator dan target Perangkat Daerah Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Kecamatan Manding Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Rincian Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rincian Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	Meningkatnya MutLayanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Dokumen yang Dikeluarkan tepat waktu	12	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sosialisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilaksanakan	12 Dok
					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun Sesuai Ketentuan	2 dok
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran yang Tersusun	2 lap

							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang Disediakan	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN	30 stel
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	125	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Item Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	16 jenis

---

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Rincian Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rincian Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 jenis
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor (Logistik) yang Disediakan	12 jenis
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 jenis
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	88 Kali

			Meningkatnya Penyelenggaraa n Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentramandan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Keterlibatan Masyarakat dan Organisasi/ Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan anDesa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan andesa yang dilaksanakan	1 Keg	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbang Desa	11 Desa
--	--	--	---	---	---	--	---	--	-------	--	---	---------

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Rincian Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rincian Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Sosialisasi / Bimtek Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	11 Desa
					<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Kerjasama Penanganan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	12 Kali	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	1 keg
										Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1 Keg

					<b>PROGRAM PENYELENGGARA ANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Koordinasi yang Dilaksanakan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Forum Pimpinan Kecamatan Yang Dilaksanakan	12 kali	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	Jumlah Rapat Forum Pimpinan Kecamatan Yang Dilaksanakan	12 kali
--	--	--	--	--	---	--	---	--	---------	--	---	---------

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Rincian Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rincian Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Sudah Diberikan Pembekalan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	90 %	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, fungsi dan kewajiban lembaga masyarakat an	Jumlah Pembinaan TP-PKK Desa Dan Kecamatan Yang Dilaksanakan	12 bulan
										Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Desa Tentang DD dan ADD	11 Desa

#### D. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Berikut Rencana Kerja Kantor Kecamatan Manding Tahun 2023 :

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kerja Tahun 2023**  
**Kantor Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif		Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	1. Indeks SPBE 2. Nilai IKM 3. Indeks Inovasi Daerah		98% 98% 98%
			Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur		98%
			Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	1. Nilai saki 2. Opini atas 3. Tingkat Maturitas SPIP		BB 98% 98%

Sumber : Rencana Kerja Kantor Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Tahun 2023

## E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta kinerja utama yang akan dicapai yang ditentukan dengan mempertimbangkan tema pembangunan dan sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Manding	Nilai SKM	80	IKU
1.1	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Perangkat Daerah Penunjang Prasarana	1.1.1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	90%	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa., Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90%	IKU
2.1	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa Koordinasi dan Masyarakat	2.1.1 Persentase Kegiatan Masyarakat desa yangdibina	90%	
2.2	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum koordinasi	2.2.1 Persentase kegiatan pembinaan keamanan dan kenyamanan lingkungan	90%	
2.3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	2.3.1 Persentase Perangkat desa yang dibina	90%	

2.4	Meningkatnya koordinasi dan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan <b>Desa</b>	2.4.1	Persentase Pengawasan Pemerintahan Desa yang dibina	90%	
-----	---	-------	---	-----	--

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari sasaran strategis Kecamatan Manding yang diperjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja, baik Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran maupun Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan. Adapun realisasi kinerja dimaksud sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Manding	Nilai SKM	%	80	79,17	98,96%
1.1	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1.1.1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	90%	98,95%	109,94%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa., Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	%	90%	100%	111,11%
2.1	Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	2.1.1 Persentase Kegiatan Masyarakat desa yang dibina	%	90%	100%	111,11%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2.2 Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	2.2.1 Persentase kegiatan pembinaan keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	90%	100%	111,11%
	2.3 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	2.3.1 Persentase Perangkat desa yang dibina	%	90%	100%	111,11%
	2.4 Meningkatnya koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.4.1 Persentase Pengawasan Pemerintahan Desa yang dibina	%	90%	100%	111,11%

Tabel 3.2  
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2023

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Skor	80	79,17	98,96%

## B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

## Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan nilai IKM sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	78,1	79,2	
2	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	Persentase Penurunan KAMTIBNAS	%	42	45	
		Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	%	87	90	
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Manding	Nilai SKM	Skor			79,17
	3.1 Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	3.1.1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%			98,95
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa., Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	%			100
	4.1 Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	4.1.1 Persentase Kegiatan Masyarakat desa yang dibina	%			100
	4.2 Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	4.2.1 Persentase kegiatan pembinaan keamanan dan kenyamanan lingkungan	%			100
	4.3 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	4.3.1 Persentase Perangkat des ayang dibina	%			100
	4.4 Meningkatkan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.4.1 Persentase Pengawasan Pemerintahan Desa yang dibina	%			100

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kultur dan tatakelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan	Skor	78,1	79,2	
	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan				79,17

### C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5  
Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN AKHIR RENSTRA s/d TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Manding	Nilai SKM	Skor	79,17	80	82
	1.1 Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1.1.1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	98,95%	100%	100%

2	Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	%	100%	100%	100%
---	---	--	---	------	------	------

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN AKHIR RENSTRA s/d TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2.1 Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	2.1.1 Persentase Kegiatan Masyarakat desa yang dibina	%	100%	100%	100%
	2.2 Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	2.2.1 Persentase kegiatan pembinaan keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100%	100%	100%
	2.3 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	2.3.1 Persentase Perangkat desa yang dibina	%	100%	100%	100%
	2.4 Meningkatnya koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.4.1 Persentase Pengawasan Pemerintahan Desa yang dibina	%	100%	100%	100%

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN AKHIR RENSTRA s.d TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM	Skor	79,17	81	82

#### **D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

- **Tujuan** : Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.
- **Sasaran 1** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Manding
  - Keberhasilan kinerja sasaran 1 ditunjang oleh tercapainya target kinerja Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sedangkan tercapainya kinerja program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja pelaksanaan kegiatan – Kegiatan di bawahnya.
- **Sasaran 2** : Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa., Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat
  - Keberhasilan kinerja sasaran 2 ditunjang oleh tercapainya target kinerja Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum . Sedangkan tercapainya kinerja program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja pelaksanaan kegiatan – Kegiatan di bawahnya.

#### **E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya pada tahun 2023, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi atas realisasi kinerja Sasaran Renstra sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7

## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM	Skor	80	79,17	98,88 %	4.334.700	4.330.000	99,19 %	0,81%

## F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi baik sasaran, program maupun kegiatan sebagai outcome tujuan pembangunan daerah. Adapun realisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8  
Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
TUJUAN					
I	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan				
SASARAN 1					
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM	80	79,17	98,96%
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan di Kecamatan	90%	100%	111,11%
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen yang Dikeluarkan	500 dok	500 dok	100 %
SASARAN 1.1					
1.1	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	90%	98,95%	109,94%
1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	90%	98,95%	109,94%
1.1.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	3 Lap	3 Lap	100%
1.1.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 Dok	2 Dok	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	
	1.1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	100%
	1.1.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	125 unit	123 unit	98,4%
	1.1.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	5 Unit	5 Unit	100%
	1.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	100%
	1.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	9 Unit	9 Unit	100%
<b>SASARAN 2</b>						
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaa Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	90%	100%	111,11%	
<b>SASARAN 2.1</b>						
2.1	Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	Persentase Kegiatan Masyarakat Desa yang dibina	90%	100%	111,11%	
	2.1.1	PROGRAM PEMBERDAYA MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dan Organisasi/ Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan	90%	100%	111,11%
	2.1.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	2 Keg	2 Keg	100%
<b>SASARAN 2.2</b>						
2.2	Meningkatkan Koordinasi Ketentram dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	90%	100%	111,11%	

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2		3	4	5	6
	2.2.1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	90%	100%	111,11%
	2.2.1.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiba Umum	Jumlah Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	15 Kali	15 Kali	100%
<b>SASARAN 2.3</b>						
2.3	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		Persentase Perangkat Desa yang dibina	90%	100%	111,11%
	2.3.1	PROGRAM PENYELENGGA-RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi yang Dilaksanakan di Tingkat Kecamatan	90%	100%	111,11%
	2.3.1.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Keg	2 Keg	100%
<b>SASARAN 2.4</b>						
2.4	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pengawasan Pemerintahan Desa yang dibina	90%	100%	111,11%
	2.4.1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Sudah Diberikan Pembekalan	90%	100%	111,11%
	2.4.1.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	90%	100%	111,11%

## **ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN KINERJA**

Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan

- a. **Sasaran 1** : Meningkatkan Mutu Layanan Publik, sebesar 98,96% dengan indikator sasaran Nilai SKM terealisasi skor 79,17 atas Target skor 80.

Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, sebesar 111,11% dengan indikator program terealisasi 100% atas Target 90%.

Adapun keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan Kegiatan yakni Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, sebesar 100% dengan indikator Jumlah dokumen yang dikeluarkan terealisasi 500 Surat atas Target 500 Surat;

- b. **Sasaran 1.1** : Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah, sebesar 109,94% dengan indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah terealisasi 98,95% atas Target 90%. Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebesar 109,94% dengan indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor, terealisasi sebesar 98,95% atas Target 90%.

Adapun keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan 7 Kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sebesar 100% dengan indikator Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun terealisasi 3 laporan atas Target 3 laporan;
2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sebesar 100% dengan indikator jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun terealisasi 2 dokumen atas target 2 dokumen;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sebesar 100% dengan indikator jumlah jenis layanan kepegawaian terealisasi 1 Jenis atas target 1 jenis;

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sebesar 98,4% dengan indikator jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan terealisasi 125 unit atas target 123 unit;
  5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebesar 100% dengan indikator Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan terealisasi 36 unit atas target 36 unit;
  6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebesar 100% dengan indikator jumlah layanan jasa yang disediakan terealisasi 1 jenis atas target 1 jenis;
  7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebesar 100% dengan indikator Jumlah barang milik daerah yang dipelihara terealisasi 23 unit atas target 23 unit.
- c. **Sasaran 2** : Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat, sebesar 111,11% dengan indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah terealisasi 90% atas Target 100%. Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan atas Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan ketertiban Umum, dan Kesejahteraan rakyat yang ditidakanjuti.
- d. **Sasaran 2.1** : Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa, sebesar 111,11% dengan indikator Persentase Kegiatan Masyarakat Desa yang dibina terealisasi 100% atas Target 90%. Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, sebesar 111,11% dengan indikator program terealisasi 100% atas Target 90%.
- Adapun keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan Kegiatan yakni Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, sebesar 100% dengan indikator Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan terealisasi 2 Kegiatan atas Target 2 Kegiatan;
- e. **Sasaran 2.2** : Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebesar 111,11% dengan indikator Persentase Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan terealisasi 90% atas Target 100%. Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator program terealisasi 100% atas Target 90%.

Adapun keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan Kegiatan yakni Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sebesar 100% dengan indikator Jumlah Koordinasi Lintas Sektor Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan terealisasi 15 Kali atas Target 15 Kali;

- f. **Sasaran 2.3** : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, sebesar 111,11% dengan indikator Persentase Perangkat Desa yang dibina terealisasi 90% atas Target 100%. Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator program terealisasi 100% atas Target 90%.

Adapun keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan Kegiatan yakni Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, sebesar 100% dengan indikator Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional terealisasi 2 Kegiatan atas Target 2 Kegiatan;

- g. **Sasaran 2.4** : Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sebesar 111,11% dengan indikator Persentase Pengawasan Pemerintahan Desa yang dibina terealisasi 90% atas Target 100%. Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator program terealisasi 100% atas Target 90%.

Adapun keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan Kegiatan yakni Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sebesar 111,11% dengan indikator Persentase Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan terealisasi 100% atas Target 90%.

## G. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran program/kegiatan merupakan realisasi penyerapan anggaran program/kegiatan tahun anggaran 2023. Adapun realisasi program/kegiatan secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1  
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA DAERAH</b>	3.122.842.668	2.820.473.411	90,32 %
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./ KOTA</b>	2.525.251.308	2.295.350.849	98,82%
<b>I.1</b>	<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	2.530.485.208	2.300.547.699	98,78%
I.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.525.251.308	2.295.350.849	90,90%
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.234.000	5.196.850	99,23%
<b>I.2</b>	<b><i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	5.109.200	5.089.000	99,60%
I.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.109.200	5.089.000	99,60%
<b>I.3</b>	<b><i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>	32.243.250	32.162.500	99,75%
I.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.243.250	32.162.500	99,75%
<b>I.4</b>	<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	104.389.950	102.973.150	98,64%
I.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	8.081.100	8.075.900	99,94%
I.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.534.050	8.531.500	99,97%
I.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.210.800	30.206.000	99,98%
I.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.760.000	11.759.750	100,00%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
I.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	3.168.000	1.800.000	56,82%
I.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.636.000	42.600.000	99,92%
<b>I.5</b>	<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	44.192.257	44.100.000	99,79%
I.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.192.257	44.100.000	99,79%
<b>I.6</b>	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	94.329.270	91.789.477	97,31%
I.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.887.200	14.594.727	98,04%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.625.220	7.594.750	99,60%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.816.850	69.600.000	96,91%
<b>I.7</b>	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	108.767.033	107.016.585	98,39%
I.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.550.000	42.826.585	96,13%
I.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000	3.450.000	100,00%
I.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.767.033	60.740.000	99,96%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	4.334.700	4.330.000	99,89%
<b>II.1</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.334.700	4.330.000	99,89%
II.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.334.700	4.330.000	99,89%

<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	26.151.400	25.955.000	<b>99,25%</b>
<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	2	3	4	5
<b>III.1</b>	<b><i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i></b>	26.151.400	25.955.000	<b>99,25%</b>
III.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.978.200	5.960.000	99,70%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	20.173.200	19.995.000	99,12%
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20.173.200	19.995.000	99,12%
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	15.188.000	15.100.000	<b>99,42%</b>
<b>IV.1</b>	<b><i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i></b>	15.188.000	9.367.000	<b>99,42%</b>
IV.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.394.800	10.310.000	99,18%
IV.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat <sup>18</sup>	4.793.200	4.790.000	99,93%
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGA-RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	145.012.800	78.790.000	<b>54,33%</b>
<b>V.1</b>	<b><i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i></b>	145.012.800	78.790.000	<b>54,33%</b>

V.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	115.012.800	48.790.000	42,42%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000	30.000.000	100.00%
<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	2	3	4	5
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	12.639.500	12.620.000	<b>99,85%</b>
<b>VI.1</b>	<b><i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i></b>	12.639.500	12.620.000	<b>99,85%</b>
VI.1.4	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.639.500	12.620.000	<b>99,85%</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep yang memuat pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan penggagas kebijakan, program dan kegiatan yang mampu mencapai tujuan dan sasaran yang akuntabel untuk mewujudkan Visi organisasi, akuntabilitas mengandung makna kewajiban memberikan pertanggungjawaban Kecamatan Manding kepada pemberi delegasi wewenang berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagai Lembaga yang akuntabel yang dapat beroperasi secara efisien dan efektif, di samping juga memberikan masukan dan umpan balik kepada para pembuat kebijakan, serta memelihara kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini lebih sering dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibandingkan sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Oleh sebab itu apabila dalam penyusunan (LKjIP) ini masih terdapat beberapa kesalahan dan kurang sempurna, maka sikap adaptif dan responsif serta kritik dan saran sangat dibutuhkan guna perbaikan dimasa yang akan datang.